

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Melalui penelitian ini dapat disimpulkan jika kontradiksi kebijakan pemerintah mengenai pekerja seks komersial serta tidak diakuinya kehadiran pekerja seks komersial di Bandungan telah menyebabkan kebijakan tidak berjalan dengan baik. Hal itu sudah terjadi hampir sekitar tujuh tahun dan terus langgeng hingga hari ini. Adapun alasan langgengnya kontradiksi kebijakan yang terjadi berikut dengan tidak diakuinya kehadiran pekerja seks komersial di Bandungan disebabkan oleh beberapa hal seperti: telah menjadi sarana mendapatkan keuntungan bagi aparat pemerintah; mendapatkan afirmasi dari pengusaha hotel dan karaoke; dan masih rendahnya kapasitas pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

Langgengnya kontradiksi kebijakan telah berdampak terhadap semakin mengeliatnya prostitusi di Bandungan pada satu sisi. Sementara pada lain sisi, hal telah menyebabkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan, pemberdayaan, dan perlindungan bagi pekerja seks komersial di Bandungan tidak bisa terpenuhi. Ini menyebabkan pekerja seks komersial dan masyarakat di Bandungan berada dalam posisi rentan. Oleh karena itu, maka pekerja seks komersial harus memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri.

Kebutuhan dasar pekerja seks komersial berupa fasilitas kesehatan, upaya pemberdayaan, dan perlindungan telah diupayakan melalui tata kelola komunitas yang terwujud dalam bentuk Perkawis di Kalinyamat. Meskipun belum berada pada

level ideal, setidaknya keberadaan perkawis sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja seks komersial sekaligus meminimalisir dampak negatif terhadap masyarakat, utamanya perihal kesehatan. Berbeda dengan Dusun Ngunut yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja seks komersial karena tidak memiliki komunitas yang dapat dikelola. Hal ini menempatkan pekerja seks komersial dan masyarakat dalam situasi yang beresiko.

Studi ini memberikan perspektif baru mengenai upaya pemenuhan kebutuhan dasar pekerja seks komersial secara mandiri. Selain itu, studi ini juga melengkapi beberapa studi sebelumnya yang memiliki fokus dalam hal kesehatan kelompok pekerja seks komersial yang menitikberatkan kepada relasi pekerja seks komersial dengan tamunya tanpa mempertimbangan relasi seksual mereka dengan tukiman dan eksternalitas yang muncul ((Naryoso, 2014; Mulyaningrum & Puspita, 2016; Saadah & Larasaty, 2021; Mulati, 2016).

4.2 Saran

Beranjak dari hasil penilitan tersebut, kontradiksi kebijakan yang terjadi harus segera dibenahi. Pemerintah harus memiliki komitmen serius dengan memperhatikan fenomena prostitusi di seluruh Kabupaten Semarang, utamanya di wilayah Bandungan mengingat jumlahnya yang signifikan. Keberadaan komunitas pekerja seks komersial di Bandungan memiliki peranan penting dalam pemenuhan hak dasar perlindungan dan pemberdayaan pekerja seks komersial, namun dukungan dari pemerintah masih sangat dibutuhkan untuk menguatkan system kerja komunitas agar dapat berjalan dengan maksimal, serta dapat membangun komunitas lain dengan fungsi serupa di wilayah Bandungan, seperti Dusun Ngunut.

Selanjutnya, masih diperlukannya studi-studi lebih lanjut mengenai pekerja seks komersial serta relasinya dengan kekuasaan. Melalui penelitian ini, penulis mengundang para peneliti untuk memperbanyak penelitian mengenai pekerja seks komersial di Bandung. Hal ini selain akan memperkaya referensi akademis, juga dapat mmberikan referensi dalam mengkonstruksi kebijakan bagi pemerintah untuk menyikapi fenomena prostitusi dengan tepat.